



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh formasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan analisis beban kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Analisis Jabatan diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;

- k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan beban kerja jabatan.
 - (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62051

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 70 TAHUN 2016
Tanggal 31 Maret 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kepala Dinas	1						
2.	Sekretaris Dinas		1					
	a. Kepala Subbagian Umum			1				
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	2) Penyimpan Barang				1			
	3) Pengadministrasi Umum				6			
	4) Pengadministrasi Pimpinan				2			
	5) Penyiap Berkas				1			
	6) Caraka				1			
	7) Arsiparis (JfT)					1		
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1				
	1) Pengelola Kepegawaian				3			
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				3			
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				3			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				3			
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1				
	1) Bendaharawan				7			
	2) Verifikator				1			
	3) Pengelola Data Keuangan				2			
	4) Pengadministrasi Keuangan				3			
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja		1					
	a. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			1				
	1) Pengelola Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja				2			
	2) Pengadministrasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja				2			
	3) Caraka				1			
	4) Mediator Hubungan Industrial Pertama					3		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PEGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	
1	2				6	7	8
	5) Mediator Hubungan Industrial Muda					2	
	6) Mediator Hubungan Industrial Madya					1	
	b. Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja			1			
	1) Pengelola Kesejahteraan Pekerja				2		
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan Pekerja				2		
	3) Mediator Hubungan Industrial Pertama					3	
	4) Mediator Hubungan Industrial Muda					2	
	5) Mediator Hubungan Industrial Madya					1	
	c. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial			1			
	1) Pengelola Perselisihan Hubungan Industrial				2		
	2) Pengadministrasi Perselisihan Hubungan Industrial				2		
	3) Mediator Hubungan Industrial Pertama					3	
	4) Mediator Hubungan Industrial Muda					2	
	5) Mediator Hubungan Industrial Madya					1	
4.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan		1				
	a. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja			1			
	1) pengelola Pengawasan Norma Kerja				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Norma Kerja				2		
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					4	
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					3	
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					1	
	b. Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja			1			
	1) Pengelola Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja				2		
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					4	
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					3	
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					1	
	c. Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Kerja			1			
	1) Pengelola Pengawasan Lingkungan Kerja				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Lingkungan Kerja				2		
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					4	
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					3	
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					1	
5.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1				
	a. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kerja			1			
	1) Pengelola Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kerja				2		
	2) Pengadministrasi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kerja				2		
	3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					2	
	4) Pengantar Kerja Penyelia					2	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	
1	2						8
	5) Pengantar Kerja Pertama						
	6) Pengantar Kerja Muda					3	
	7) Pengantar Kerja Madya					2	
	b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga kerja			1		1	
	1) Pengelola Penempatan Tenaga Kerja				2		
	2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja				2		
	3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					1	
	4) Pengantar Kerja Penyelia					1	
	5) Pengantar Kerja Pertama					3	
	6) Pengantar Kerja Muda					2	
	7) Pengantar Kerja Madya					2	
	c. Kepala Seksi Transmigrasi			1			
	1) Pengelola Transmigrasi				2		
	2) Pengadministrasi Transmigrasi				3		
	3) Penyiap Berkas				1		
6.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas		1				
	a. Kepala Seksi Produktifitas			1	2		
	1) Pengelola Produktifitas				3		
	2) Pengadministrasi Produktifitas						
	b. Kepala Seksi Standardisasi			1			
	1) Analis Standardisasi				2		
	2) Pengadministrasi Standardisasi				3		
	3) Penyiap Berkas				1		
	c. Kepala Seksi Pemagangan			1			
	1) Pengelola Pemagangan				2		
	2) Pengadministrasi Pemagangan				3		
7.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Data Keuangan				1		
	6) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				3		
	8) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas			1			
	1) Pengelola Pelatihan dan Produktifitas				2		
	2) Pengadministrasi Pelatihan dan Produktifitas				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1			
	1) Pengelola Data Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2		
	2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja				2		
	3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					1	
	4) Pengantar Kerja Penyelia					4	
	5) Pengantar Kerja Pertama					4	
	6) Pengantar Kerja Muda					4	
	7) Pengantar Kerja Madya					2	
	d. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja			1			
	1) Pengelola Data Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	3) Mediator Hubungan Industrial Pertama					5	
	4) Mediator Hubungan Industrial Muda					4	
	5) Mediator Hubungan Industrial Madya					2	
	e. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan			1			
	1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan				2		
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					10	
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					12	
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					3	
8.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Data Keuangan				1		
	6) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				3		
	8) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas			1			
	1) Pengelola Pelatihan dan Produktifitas				2		
	2) Pengadministrasi Pelatihan dan Produktifitas				2		
	c. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1			
	1) Pengelola Data Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2		
	2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja				2		
	3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					1	
	4) Pengantar Kerja Penyelia					4	
	5) Pengantar Kerja Pertama					4	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Pengantar Kerja Muda					4	
	7) Pengantar Kerja Madya					2	
	d. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja			1			
	1) Pengelola Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	3) Penyiap Berkas				1		
	4) Mediator Hubungan Industrial Pertama					5	
	5) Mediator Hubungan Industrial Muda					4	
	6) Mediator Hubungan Industrial Madya					2	
	e. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan			1			
	1) Pengelola Pengawasan Ketenagakerjaan				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan				3		
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					10	
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					12	
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					3	
9.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Data Keuangan				1		
	6) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				3		
	8) Caraka				1		
	b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas			1			
	1) Pengelola Pelatihan dan Produktifitas				2		
	2) Pengadministrasi Pelatihan dan Produktifitas				2		
	c. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1			
	1) Pengelola Data Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2		
	2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja				2		
	3) Penyiap Berkas				1		
	4) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					1	
	5) Pengantar Kerja Penyelia					3	
	6) Pengantar Kerja Pertama					4	
	7) Pengantar Kerja Muda					4	
	8) Pengantar Kerja Madya					2	
	d. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja			1			
	1) Pengelola Data Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	3) Mediator Hubungan Industrial Pertama					5	
	4) Mediator Hubungan Industrial Muda					4	
	5) Mediator Hubungan Industrial Madya					2	
	c. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan			1			
	1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan				2		
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					10	
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					12	
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					3	
10.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Data Keuangan				1		
	6) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				3		
	8) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas			1			
	1) Pengelola Pelatihan dan Produktifitas				2		
	2) Pengadministrasi Pelatihan dan Produktifitas				2		
	c. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1			
	1) Pengelola Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2		
	2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja				2		
	3) Pengantar Kerja Pelaksanaan Lanjutan					1	
	4) Pengantar Kerja Penyelia					3	
	5) Pengantar Kerja Pertama					4	
	6) Pengantar Kerja Muda					4	
	7) Pengantar Kerja Madya					2	
	d. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja			1			
	1) Pengelola Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2		
	3) Mediator Hubungan Industrial Pertama					5	
	4) Mediator Hubungan Industrial Muda					4	
	5) Mediator Hubungan Industrial Madya					2	
	e. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan			1			
	1) Pengelola Pengawasan Ketenagakerjaan				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7		
1	2			5	6	7	8	
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan				3			
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					10		
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					12		
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya					3		
11.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Penyimpan Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Data Keuangan				1			
	6) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	7) Pengadministrasi Umum				3			
	b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas			1				
	1) Pengelola Pelatihan dan Produktivitas				2			
	2) Pengadministrasi Pelatihan dan Produktivitas				2			
	3) Penyiap Berkas			1	1			
	c. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
	1) Pengelola Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2			
	2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja				2			
	3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					1		
	4) Pengantar Kerja Penvelia					3		
	5) Pengantar Kerja Pertama					4		
	6) Pengantar Kerja Muda					4		
	7) Pengantar Kerja Madya					2		
	d. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja			1				
	1) Pengelola Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2			
	2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja				2			
	3) Mediator Hubungan Industrial Pertama					5		
	4) Mediator Hubungan Industrial Muda					4		
	5) Mediator Hubungan Industrial Madya					2		
	e. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan			1				
	1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan				2			
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan				2			
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					10		
	4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda					12		
	5) Pengawas Ketenagakerjaan Madva					3		
	f. Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten			1				
	1) Pengelola Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	
1	2 2) Pengadministrasi Umum				6 1	7 1	8
12.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1	1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	7) Caraka				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1		
	1) Pengolah Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	2) Pengadministrasi Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	3) Instruktur Penyelia					1	
	4) Instruktur Pertama					11	
	5) Instruktur Muda					10	
	6) Instruktur Madya					2	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1		
	1) Pengolah Pengendalian dan Pemasaran				2		
	2) Pengadministrasi Pengendalian dan Pemasaran				2		
13.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1	1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	7) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	3) Instruktur Pertama					11	
	4) Instruktur Muda					11	
	5) Instruktur Madya					2	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
14.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat		1				

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PEGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7		
1	2						8	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1	6	7		
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Penyimpan Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	6) Pengadministrasi Umum				3			
	7) Penyiap Berkas				1			
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1			
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2			
	3) Instruktur Pertama					11		
	4) Instruktur Muda					11		
	5) Instruktur Madya					2		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1			
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2			
15.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Penyimpan Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
	6) Pengadministrasi Umum				3			
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1			
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2			
	3) Instruktur Pelaksana Lanjutan					2		
	4) Instruktur Penyelia					2		
	5) Instruktur Pertama					11		
	6) Instruktur Muda					11		
	7) Instruktur Madya					2		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1			
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2			
16	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1	1	
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	3) Instruktur Pertama					11	
	4) Instruktur Muda					11	
	5) Instruktur Madya					2	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
17.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	7) Penyiap Berkas						
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	3) Instruktur Pelaksana					1	
	4) Instruktur Pelaksana Lanjutan					2	
	5) Instruktur Penyelia					4	
	6) Instruktur Pertama					13	
	7) Instruktur Muda					10	
	8) Instruktur Madya					2	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
	3) Caraka				1		
18.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Khusus LAS		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PEGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	
1	2						8
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	7) Caraka				2		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi				2		
	3) Caraka				2		
	4) Instruktur Penyelia					1	
	5) Instruktur Pertama					11	
	6) Instruktur Muda					8	
	7) Instruktur Madya					2	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran				2		
19	Kepala Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	7) Caraka				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan Cuti Luar Negeri				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan				2		
	3) Pengantar Kerja Pelaksana					1	
	4) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan					1	
	5) Pengantar Kerja Penyelia					1	
	6) Pengantar Kerja Pertama					2	
	7) Pengantar Kerja Muda					2	
	8) Pengantar Kerja Madya				1	1	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan				2		
	3) Instruktur Pertama					2	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Instruktur Muda					1	
	5) Instruktur Madya					1	
20.	Kepali:		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Pengadministrasi Umum				3		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan				2		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Analisis				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Analisis				2		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Analisis				2		
	3) Caraka				2		
	5) Teknik Penelitian dan Perencanaan Pelaksanaan					10	
	6) Teknik Penelitian dan Perencanaan Pelaksanaan Lanjutan					6	
	7) Teknik Penelitian dan Perencanaan Penyela					5	
	8) Perakayasa Pertama					10	
	9) Perakayasa Muda					4	
	10) Perakayasa Madya					3	
	11) Perakayasa Utama					2	
	Jumlah	1	19	51	402	544	
	Jumlah Total				1017		0

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA